

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Pengurus Pusat Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Eri Unanto

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Lebih Intim dengan Maritim



Potensi perekonomian di sektor kemaritiman sangatlah besar, mulai dari pariwisata, perikanan, hingga sumber daya mineral. Tentu, potensi yang besar ini harus bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan bangsa

Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian. Hal inilah yang tengah diusung pemerintah kita dalam program pembangunan dan ekonomi.

Besarnya potensi sektor kemaritiman salah satunya bisa dilihat dari proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan pada 2015 yang mengalami kenaikan lima kali lipat. Pada 2015 PNBP ditargetkan naik menjadi sebesar Rp1,5 triliun dari sebelumnya (2014) sebesar Rp250 miliar.

Selain itu, masih ada potensi dan pembangunan ekonomi terkait dengan sektor kemaritiman ini, seperti pembangunan infrastruktur tol laut yang terintegrasi dengan enam pelabuhan utama dan 23 lokasi pelabuhan perintis baru. Proyek itu ditaksir menelan investasi atau anggaran sekitar Rp83,3 triliun.

Namun, memaksimalkan atau meningkatkan pergerakan ekonomi di sektor kemaritiman pastinya membutuhkan pembiayaan yang lebih maksimal, termasuk dari perbankan. Para pelaku usaha di sektor ini butuh peningkatan kapasitas modal untuk membesarkan usahanya.

Sejauh ini perbankan nasional memang telah memberikan kredit kepada sektor kemaritiman. Tentunya pihak perbankan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit ke sektor kemaritiman ini serta mempertimbangkan risikonya. Itu karena sebagian sektor kemaritiman dinilai memiliki risiko yang tinggi. Makanya, pembiayaan yang dilakukan perbankan ke sektor ini pun agak minim dan tersendat. Merujuk pada informasi dan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* di sektor kemaritiman pernah mencapai 11%. Memang, belakangan ini angkanya terus membaik.

Untuk menyelesaikan persoalan di sektor kemaritiman, segenap *stakeholders* terkait selama ini terus mencari solusi dan melakukan diskusi secara intens. Salah satunya dengan membuat program Jangkau Sinergi dan *Guideline* (Jaring). Sasaran jangka pendek program Jaring ialah menyediakan infrastruktur bagi sektor jasa keuangan dalam meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50% pada 2015. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam bentuk buku. Buku tersebut berisikan data dan informasi potensi bisnis dan peta risiko, *value chain* bisnis, dan skim pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan.

Dengan berbagai langkah dan upaya yang ditempuh oleh segenap *stakeholders* terkait, diharapkan pembiayaan pada sektor ini bisa terus meningkat secara signifikan. Alhasil, perekonomian dan kesejahteraan bangsa ini pun terus tumbuh. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Banyak Potensi, Harus Bersinergi.....3
 Sebagai negara kepulauan, akses dan potensi ekonomi Indonesia di sektor maritim tentu sangat besar. Potensi ini harus dimaksimalkan segenap *stakeholders*, termasuk perbankan, agar perekonomian nasional terus maju dan berkembang.



Peluang Besar Kredit Kemaritiman 6
Realisasi Program Jaring 8

Sekilas Berita
Indonesia Banking Expo 2015 9

Aktualita
Dampak Pelonggaran LTV Belum Signifikan.....10
 Penurunan daya beli membuat penjualan properti dan otomotif lesu. Salah satu respons dan langkah yang diambil regulator ialah melakukan pelonggaran *LTV* untuk menstimulus pertumbuhan kredit. Seberapa efektifkah kebijakan pelonggaran *LTV*?



Indonesia Mampu Hadapi Tantangan Global12
Upaya Perbanas Dorong Keuangan Inklusif14
 Akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk perbankan, hingga saat ini masih dinilai rendah. Berbagai upaya program keuangan inklusif pun ditempuh untuk meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan perekonomian nasional.

Kinerja
Menjaga Kualitas Kredit 16



Regulasi
Upaya Meningkatkan Suplai Valas18
 Di tengah lesunya perekonomian nasional, OJK memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Salah satunya dengan merilis aturan untuk memberikan kemudahan kepada WNA yang akan membuka rekening valas.

Profil
Catherine Hadiman, Komisaris Independen BTN
Menjaga Performa di Tengah Kelesuan.....20
 Walau perlambatan ekonomi berdampak pada bisnis perbankan di Tanah Air, perbankan harus tetap bergerak dan menjaga performa. Langkah yang bisa dilakukan ialah memperbaiki kualitas kredit dan struktur likuiditas serta meningkatkan kompetensi SDM.

Wacana
Hadapi Krisis, UU JPSK Mendesak.....23
 UU JPSK sangat mendesak dan dibutuhkan mengingat beberapa tahun belakangan Indonesia kerap terkena dampak krisis global. Pengalaman krisis 1997/1998 membuat pemerintah harus melakukan perbaikan di segala bidang, termasuk antisipasi menghadapi kondisi yang tidak normal.



Banyak Potensi, Harus Bersinergi

Sebagai negara kepulauan, akses dan potensi ekonomi Indonesia di sektor maritim tentu sangat besar. Potensi ini harus dimaksimalkan segenap *stakeholders*, termasuk perbankan, agar perekonomian nasional terus maju dan berkembang.

Merujuk pada sejarah, Indonesia sejatinya adalah negara yang kuat di sektor kemaritiman. Hal itu telah dibuktikan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada zamannya. Kedua kerajaan ini menjadi kuat dan tersohor karena menguasai laut atau sektor maritim dengan baik.

Karena itulah, sektor maritim menjadi salah satu sektor

prioritas dalam program ekonomi dan pembangunan yang diusung pemerintahan saat ini. Memang, untuk mewujudkan mimpi atau keinginan itu tidaklah mudah. Segenap *stakeholders* di negeri ini harus bersinergi.

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di sektor kemaritiman. Menurut pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, setidaknya ada tiga potensi sumber daya

kemaritiman di Indonesia. Yakni, potensi sumber daya di atas air, misalnya transportasi laut; sumber daya di dalam air, seperti ikan dan keanekaragaman hayati lainnya yang ada di dalam laut; dan sumber daya di bawah dasar lautan, terkait erat dengan letak geografis dan geoteknik Indonesia yang menyebabkan wilayah Indonesia kaya akan sumber daya mineral serta minyak dan gas bumi, terutama di dasar laut.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memang luar biasa. Jenis ikan di perairan Indonesia mencapai 8.500 jenis atau terbanyak di dunia, dengan kapasitas tangkap maksimum secara lestari sekitar 7 juta ton/tahun. Namun, volume masing-masing jenis ikan adalah minimal sehingga proses pengolahan ikan menjadi penting agar tidak ada ikan tangkapan nontarget yang terbuang.

Terkait dengan besarnya potensi yang bisa digarap, bidang kemaritiman saat ini ditangani oleh beberapa kementerian, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Potensi ekonomi kemaritiman sangatlah besar. Hal itu antara lain tampak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Pada 2015 PNBP dari sektor tersebut naik lima kali lipat. Jika pada 2014 angkanya tercatat Rp250 miliar, pada 2015 ditargetkan naik menjadi Rp1,5 triliun.

Masih banyak potensi dan pembangunan ekonomi terkait dengan sektor kemaritiman. Misalnya, pembangunan infrastruktur tol laut yang terintegrasi dengan enam pelabuhan utama dan 23 lokasi pelabuhan perintis baru, yang ditaksir menelan investasi atau anggaran sekitar Rp83,3 triliun.

Dengan begitu, sinergi yang dilakukan harus menyeluruh dan secepatnya dilakukan. Berbagai koordinasi dan pertemuan *stakeholders* terkait pun telah dilakukan. Misalnya, sebuah dialog dan diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, pada awal April 2015. Saat itu disepakati bahwa setiap pemangku kebijakan dan kepentingan yang terkait dengan sektor kemaritiman harus bersinergi dan bekerja sama, misalnya dalam hal revitalisasi dan pembiayaan.

Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti pada pertemuan kedua yang digelar pada awal Juli 2015. Dalam acara urun rembuk yang membahas tentang sektor kelautan dan perikanan itu, Kadin juga menggandeng sejumlah instansi dan lembaga terkait. Acara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai potensi yang bisa dioptimalkan dalam rangka menyikapi isu poros maritim dunia.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, Kadin siap menjadi pionir bagi perekonomian kemaritiman. "Melalui acara urun rembuk silaturahmi ini, Kadin Kelautan Perikanan ingin menjadi pionir dalam merangkul pemerintah, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), TNI (Tentara Nasional Indonesia), kalangan pengusaha, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi terhadap berbagai peluang ekonomi di sektor

kelautan, perikanan, dan kemaritiman," ungkap Yugi.

Kadin merasa perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai sektor kelautan dan perikanan yang terkena imbas gejolak perekonomian global. "Apalagi, dolar juga masih tinggi. Jadi, pemetaan ini penting sekali untuk kita mampu memanfaatkan momentum perlambatan dunia bagi ekonomi nasional," terangnya.

Kadin juga menilai, pemetaan masalah distribusi dan perhubungan penting untuk diformulasikan secara komprehensif. "Nah, itu yang kami lihat. Jika secara bisnis peluangnya ada, kenapa tidak kita lanjutkan dengan kerja sama bersama BUMN (badan usaha milik negara) yang membangun galangan kapal ataupun membangun pelabuhannya. Jadi, BUMN dan Kadin punya *share* dalam program itu, sementara Kadin sebagai pengelolanya. Semua pihak bersinergi baik untuk hasil optimal bagi ekonomi nasional," papar Yugi.

Saat ini sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat langkah implementasi bersama. Pasalnya, cukup sulit jika hanya mengandalkan kalangan pengusaha, mengingat perekonomian global tengah mengalami kontraksi. Karena itu, semua pihak terkait harus turun tangan, berusaha, serta bersinergi dalam membangun perekonomian kemaritiman Indonesia dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada Mei 2015 tercatat 1,3 juta orang atau naik 2,92% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (*month on month/mom*). Peningkatan jumlah penumpang ini terjadi di sejumlah pelabuhan, antara lain di Pelabuhan Balikpapan yang naik 16%, Pelabuhan Tanjung Priok 11,43%, Pelabuhan Makassar 9,06%, dan Pelabuhan Belawan 2,33%. Sementara, pada periode Januari-Mei 2015 jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri tercatat 5,6 juta orang atau naik 10,45% dibandingkan dengan periode yang sama 2014 (*year on year/yooy*).

Upaya lain yang mesti dilakukan ialah mendorong akses perbankan bagi nelayan dan pengusaha. Saat ini Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan tengah mendorong penguatan organisasi koperasi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengoptimalkan produksi perikanan budi daya nasional dan produksi perikanan tangkap. Kadin juga akan memfasilitasi 10 proposal usaha perikanan dari berbagai provinsi yang lolos seleksi untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.

Produksi perikanan Indonesia yang melimpah seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan industri pengolahan. Dengan demikian, komoditas perikanan memiliki nilai tambah dan mendongkrak kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan. Hingga saat ini, potensi perikanan belum digarap secara maksimal. Lihat saja, nilai ekspor komoditas perikanan tercatat US\$4,63 miliar pada 2014. Pemerintah menargetkan nilai ekspor komoditas tersebut naik menjadi US\$9,54 miliar pada 2019.

Menurut Achmad Poernomo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sumber

daya laut mestinya memang dikelola dengan benar. Jika tidak, pemerintah terancam kehilangan US\$800 miliar per tahun.

Memaksimalkan Kredit

Penyaluran kredit ke sektor maritim sejatinya telah dilakukan perbankan nasional. Namun, kredit yang diberikan dinilai masih sangat minim. Hal itu terjadi karena risiko di sektor tersebut dinilai masih cukup tinggi. Menurut catatan yang ada, sektor maritim memiliki risiko yang relatif tinggi. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* di sektor maritim pernah mencapai angka 11%. Namun, belakangan ini angkanya terus membaik. Jika pada 2010, misalnya, *NPL* di sektor tersebut melebihi 5%, saat ini sudah turun ke level 3%-3,5%.

Terkait dengan hal itu, OJK mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor maritim karena sektor ini memiliki potensi besar. OJK bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan melalui program Jangkau Sinergi dan *Guideline* (Jaring).

Ada delapan bank pelopor dalam program yang mengusung tema “Tumbuh, Berkembang, Berdaya Saing” ini, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, PermataBank, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Sulselbar, dan Bank Bukopin. Selain itu, ada beberapa perusahaan keuangan nonbank lainnya yang turut serta dalam program tersebut. Adapun, total dana yang disiapkan industri keuangan dalam program Jaring mencapai Rp7,2 triliun hingga Desember 2015.

Sasaran jangka pendek program Jaring ialah menyediakan infrastruktur bagi sektor jasa keuangan dalam meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50% pada 2015. Hal itu antara lain dilakukan melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam bentuk buku berisi data dan informasi tentang potensi bisnis dan peta risiko, *value chain* bisnis, serta skim pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan. Buku ini dilengkapi dengan uraian dukungan regulasi dan instansi terkait serta ketersediaan regulasi yang kondusif bagi pembiayaan sektor jasa keuangan kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. ■

Masuk ke Perkapalan dan Pelabuhan



Indarto Pamoengkas

Selama ini Bank Mandiri telah menyalurkan kreditnya ke sektor kemaritiman. Dan, ke depan Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaannya ke sektor tersebut, terutama untuk perkapalan dan pelabuhan. Salah satu kredit yang diberikan bank badan usaha milik negara (BUMN) ini adalah kredit investasi senilai Rp3 triliun kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV. Kredit tersebut diberikan untuk pembangunan Makassar New Port, modernisasi peralatan

bongkar muat peti kemas, serta pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah operasional Pelindo IV.

Kredit tersebut rencananya diberikan dalam dua denominasi, yakni dalam rupiah sebesar Rp1,96 triliun dan valuta asing (valas) sebesar US\$80 juta. Di samping pinjaman, Bank Mandiri memberikan dukungan finansial lain, yakni fasilitas *treasury line* dengan limit US\$80 juta dan bank garansi dengan limit Rp40 miliar.

Penandatanganan perjanjian kredit berjangka waktu 7,5 tahun tersebut dilakukan *Senior Vice President Corporate Banking* Bank Mandiri, Indarto Pamoengkas dan Direktur Keuangan Pelindo IV, Budi Revianto, di Terminal Penumpang Soekarno Hatta, Makassar, Kamis (15/10). Penandatanganan itu disaksikan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung.

Menurut Indarto Pamoengkas, pemberian kredit ini bertujuan mempercepat pengadaan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah Indonesia timur. Melalui sinergi antar-BUMN ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat daya dukung infrastruktur nasional, terutama sektor kemaritiman, yang salah satunya ialah pelabuhan, melalui percepatan pelaksanaan pembangunan tol laut. Mengingat, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan dua per tiga wilayah negara ini adalah perairan.

“Dengan infrastruktur yang baik, lalu lintas barang dan jasa akan semakin lancar dan terjangkau. Sehingga, pemberian kredit ini pada akhirnya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, terutama di kawasan Indonesia timur,” ujar Indarto.

Pembangunan Makassar New Port, tambah Indarto, merupakan langkah aktif Pelindo IV untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan peti kemas Makassar, menjadi penyambung (konektivitas) antarpulau, serta mendukung sistem logistik nasional, khususnya di wilayah Indonesia timur.

Groundbreaking Makassar New Port telah dilaksanakan pada 22 Mei 2015 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pelindo IV sendiri mengusung *tagline* “Menjadi Lokomotif Indonesia Timur” dengan mengembangkan konsep *port create the trade* atau mengikuti *supply approach strategy*.

Makassar New Port nantinya akan terintegrasi dengan rencana proyek jalur kereta untuk barang di Sulawesi Selatan sehingga mempermudah distribusi barang angkutan. Pembangunan pelabuhan itu diharapkan memicu pertumbuhan arus kapal yang didukung oleh pertumbuhan industri di Kawasan Timur Indonesia.

Peluang Besar Kredit Kemaritiman

Potensi sektor kemaritiman untuk dikucuri kredit perbankan sangat besar. Sayangnya, masih berisiko tinggi. Agar penyaluran kredit perbankan maksimal dan aman, OJK bersama para pelaku usaha, termasuk perbankan, telah menjalin sinergi.

Pembangunan dan pengembangan sektor kemaritiman menjadi salah satu prioritas program pembangunan dan perekonomian yang diusung pemerintahan saat ini. Program tersebut dinilai akan mendorong pembangunan dan perekonomian nasional, mengingat kondisi demografi Indonesia didominasi wilayah laut. Dengan kata lain, potensi ekonomi Indonesia di sektor kemaritiman sangat besar.

Hal itu tentu saja mendapat respons yang sangat positif dari para pelaku usaha di sektor kemaritiman. Namun, sumber pembiayaan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha di sektor tersebut untuk membesarkan dan mengembangkan usahanya. Pasalnya, industri perbankan hingga saat ini masih menilai sektor kemaritiman sebagai sektor yang berisiko tinggi, walau memang ada beberapa bidang yang berisiko rendah dan telah dimasuki perbankan.

Terkait dengan hal itu, segenap *stakeholders* membangun sinergi agar penyaluran kredit ke sektor kemaritiman lebih maksimal dan risikonya terkelola dengan baik. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) bersama para pelaku usaha, yakni perusahaan pembiayaan (*multifinance*), bank, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), telah membangun sinergi melalui program Jangkau Sinergi dan *Guideline* (Jaring).

Sekadar informasi, hingga saat ini, sudah ada delapan bank yang bersinergi dalam program tersebut. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), PT PermataBank, PT Bank Bukopin, dan Bank Sulsebar.

Melalui program tersebut, pembiayaan ke sektor kemaritiman diharapkan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang. Pada 2015 diharapkan kredit ke sektor tersebut meningkat sebesar 66,2% dibandingkan dengan 2014 yang tercatat Rp10,8 triliun. Lantas, bagaimana pandangan pelaku industri perbankan? Berikut ini tanggapan Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI; Mikrowa Kirana, Direktur Bank Bukopin; dan Asmawi Syam, Direktur Utama BRI.

Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI Akan Jauh Lebih Besar



Salah satu bank yang telah menetapkan target kredit sektor kemaritiman adalah BNI. Bank badan usaha milik negara (BUMN) ini mematok angka Rp1,6 triliun untuk kredit ke sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun ini. Sudah ada beberapa lini usaha di sektor tersebut yang akan dikucuri kredit. Beberapa lini usaha yang sudah dibidik perusahaan ialah sektor

koperasi perikanan, industri es balok dan *cold storage*, kapal penangkap ikan, pengolahan ikan berbagai skala, serta infrastruktur dan perhubungan laut.

Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, mengatakan, nilai penyaluran kredit maritim kali ini jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Menurutnya, penyaluran kredit ini akan membantu program pemerintah yang menjadikan sektor maritim sebagai fokus utama pembangunan.

“Berbagai macam sektor, tidak hanya di maritim, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan pun sangat besar. Karena itu, kami berani pasang target di sektor maritim,” ujarnya kepada wartawan di kantornya.

Baiquni menambahkan, ke depan sektor kelautan dan perikanan memiliki prospek yang bagus. Sayangnya, sektor tersebut belum tergarap secara maksimal oleh semua pelaku industri. Dia optimistis, peningkatan penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan akan mempermudah akses

masyarakat terhadap layanan perbankan sehingga ikut membantu memajukan sektor tersebut secara cepat.

Komitmen BNI dalam penyaluran kredit maritim terlihat dari program kerja sama pelaku industri dengan OJK yang diberi nama Jaring. Dan, salah satu langkah yang telah disiapkan BNI adalah menjalin kemitraan dengan mengembangkan Kampoeng BNI.

Melalui Kampoeng BNI, tak hanya bantuan yang akan diberikan, peningkatan bisnis pun akan terus dilakukan. Dari sini kredit kemitraan bagi nelayan akan diberikan, meski nelayan tersebut belum *bankable*.

Program lain yang diusung BNI ialah kerja sama dengan perusahaan penjaminan, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Kerja sama itu dinilai akan membesarkan penyaluran kredit BNI ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kemaritiman yang dinilai memiliki potensi besar.

Menurut Baiquni, penyaluran kredit ke sektor kemaritiman berisiko meningkatkan kredit macet. “Kerja sama ini menjamin debitor-debitor yang selama ini belum *bankable* karena belum punya jaminan kredit dari Jamkrindo,” tambahnya. ■

Mikrowa Kirana, Direktur Bank Bukopin Target Rp2,67 Triliun



Tahun ini Bank Bukopin menargetkan penyaluran kreditnya ke sektor kemaritiman sebesar Rp2,67 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp2,5 triliun dialokasikan untuk pembiayaan transportasi laut dan Rp170 miliar untuk pembiayaan perikanan. Mikrowa Kirana, Direktur Bank Bukopin, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa kredit

maritim yang disalurkan banknya sepanjang 2014 tercatat Rp2,19 triliun—sebesar Rp2,1 triliun untuk pembiayaan transportasi laut dan sisanya (Rp89 miliar) untuk pembiayaan perikanan.

“Pada 2015 Bank Bukopin berencana menambah pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp481 miliar, yang terdiri atas pembiayaan transportasi laut sebesar Rp400 miliar dan pembiayaan perikanan sebesar Rp81 miliar,” jelasnya.

Hingga triwulan pertama tahun ini, penyaluran kredit maritim Bank Bukopin mencapai Rp55,3 triliun atau naik 13,50% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara, aset perusahaan pada periode yang sama naik 12,69% menjadi Rp81,5 triliun dan laba tercatat Rp199 miliar. ■

Asmawi Syam, Direktur Utama BRI Memperluas Lini



Tak hanya BNI dan Bank Bukopin, BRI juga memasang target tinggi untuk kredit kemaritiman. Sepanjang tahun ini BRI menargetkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp2,5 triliun dan untuk seluruh kredit kemaritiman mencapai Rp4,8 triliun.

Menurut Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, peningkatan kredit ke sektor maritim akan dilakukan melalui program Jaring yang

telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengucuran kredit itu untuk tahap pertama akan dilakukan di wilayah Indonesia timur, seperti Maluku dan Sulawesi.

Melalui kredit kemaritiman, BRI akan memperluas cakupan pembiayaan perikanan untuk budi daya perikanan, hasil laut, usaha tangkap, budi daya air payau, air tawar, air laut, bio tuna, ekstrasi garam, perdagangan hasil laut, perdagangan dalam negeri, rumput laut, ekspor hasil perikanan, dan udang

BRI juga akan mengembangkan industri turunan lainnya dari pengolahan ikan, seperti *cold storage*. Industri ini diperlukan agar nelayan mampu mempertahankan ikan segar dan olahannya demi mendapatkan harga jual yang tinggi.

olahan. Sementara, untuk sektor kelautan, BRI akan melebarkan sayapnya ke pembiayaan pembuatan kapal.

Tak hanya itu, BRI juga akan mengembangkan industri turunan lainnya dari pengolahan ikan, seperti *cold storage*. Industri ini diperlukan agar nelayan mampu mempertahankan ikan segar dan olahannya demi mendapatkan harga jual yang tinggi. Dengan rencana itu, BRI menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

“Tahapannya, pembuatan kapal untuk industri penangkapan. Kemudian, *cool storage*, dan selanjutnya diolah menjadi industri pengolahan hasil laut. *Value change* dari industri ini ada jasa sarana produksi penangkapan ikan, pembiayaan layanan bongkar muat, jasa sewa alat transportasi, pergudangan, dan produksi,” papar Asmawi. ■

Realisasi Program Jaring

Program Jaring sukses merangkul 13 bank untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan. Tahun ini penyalurannya diperkirakan sesuai dengan target.

Kelautan dan perikanan kini menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ke depan sektor ini bahkan diharapkan dapat ikut berkontribusi terhadap perekonomian. Karenanya, berbagai program pengembangan sektor kelautan dan perikanan pun digeber pemerintah.

Sayang, dukungan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan saat ini dinilai belum maksimal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit ke sektor perikanan per September 2015 baru mencapai Rp8,24 triliun atau sekitar 0,21% dari total penyaluran kredit bank umum yang sebesar Rp3.881,29 triliun.

Padahal, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar. Ketua Tim Jaring OJK, Slamet Edy Purnomo, mengatakan, sektor kelautan dan perikanan tumbuh sekitar 12%. Potensi kredit untuk sektor industri pengelolaan dan jasa mencapai Rp20,2 triliun, pengolahan produksi Rp5,7 triliun, pemasaran Rp6,1 triliun, budi daya tangkap Rp4,6 triliun, budi daya Rp3,3 triliun, dan industri hulu Rp778 miliar.

Untuk mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan, OJK bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* atau Jaring. Sasaran utama program Jaring ialah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.

Saat program Jaring diluncurkan, ada delapan bank pelopor yang ikut berpartisipasi, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Danamon Indonesia, PermataBank, Bank Bukopin, dan Bank Sulselbar.

Selain itu, ada lima lagi bank partner baru yang ikut bergabung dalam program Jaring 2015, yaitu Bank Central Asia (BCA), Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, dan Bank Jatim. OJK menyebutkan, keikutsertaan beberapa bank yang baru ini sejalan dengan target jangka menengah-panjang 2016, antara lain memperluas pembiayaan



Mulya E. Siregar; lampau target

ke seluruh sektor maritim, yang di antaranya mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan, dan industri maritim.

Tak hanya perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan juga datang dari industri keuangan nonbank (IKNB) melalui Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan.

Sejauh ini beberapa bank dan IKNB yang berkomitmen untuk menjalankan program Jaring sudah menunjukkan hasil. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, mengatakan, penyaluran kredit

dari industri perbankan dan IKNB sampai dengan September tahun ini sudah mencapai Rp4,41 triliun atau 82,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,2 triliun. Mulya menambahkan, ada tiga bank yang jumlah penyaluran pembiayaannya telah melampaui target hingga September 2015, yaitu BRI, BTPN, dan Bank Sulselbar. “Program Jaring ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, memperbaiki kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mulya. ■

REALISASI KREDIT DELAPAN BANK PARTNER JARING PER SEPTEMBER 2015

Bank	Kredit	Target	Realisasi (%)
BRI	Rp2,91 triliun	Rp2,50 triliun	116,76%
BTPN	Rp221,9 miliar	Rp50 miliar	443,98%
Bank Sulselbar	Rp32,5 miliar	Rp13 miliar	250,67%
BNI	Rp393,90 miliar*	Rp1 triliun	39,39%
Bank Mandiri	Rp624,00 miliar*	Rp1,25 triliun	49,92%
Bank Danamon	Rp107,31 miliar*	Rp300 miliar	35,77%
PermataBank	Rp50,00 miliar*	Rp180 miliar	27,78%
Bank Bukopin	Rp62,37 miliar*	Rp81 miliar	77,00%

*asumsi

Sumber: OJK.

Indonesia Banking Expo 2015

Pada 9-11 September 2015 Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menggelar “Indonesia Banking Expo (Ibex) 2015” di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah bergeser ke era digital, Ibex kali ini mengusung tema “Pengembangan Perbankan Digital dalam Memperluas Akses Keuangan dan Pelayanan kepada Masyarakat”.

Acara yang mengikutsertakan sektor perbankan dan sektor riil, seperti teknologi informasi dan jasa itu, dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutan pembukaannya, Jokowi mengungkapkan, perbankan Indonesia tidak menghadapi masalah yang berarti di tengah kondisi perekonomian global seperti sekarang ini.

Acara tersebut didukung oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI).



Dampak Pelonggaran LTV Belum Signifikan

Penurunan daya beli masyarakat membuat penjualan properti dan otomotif lesu. Salah satu respons dan langkah yang diambil regulator ialah melakukan pelonggaran LTV untuk menstimulus pertumbuhan kredit. Seberapa efektifkah kebijakan pelonggaran LTV?

Guncangan dan gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia belakangan ini makin mengkhawatirkan. Kabarnya, jika hal itu tidak segera ditangani, bisa kembali mengakibatkan krisis. Pasalnya, sejumlah tanda krisis mulai terlihat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), misalnya, sempat terpukul karena aksi sejumlah spekulasi yang memanfaatkan keadaan. Sejalan dengan kondisi bursa global yang memerah, IHSG pun diprediksi masih akan terus mengalami tekanan.

Sementara, inflasi mengalami kenaikan yang dipicu oleh melonjaknya harga pangan. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang merosot hingga level Rp14.000 per US\$1. Bahkan, Bank Indonesia (BI) kembali mengoreksi target pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun menjadi 4,9% saja.

Kondisi ekonomi dan berbagai indikator tersebut tentu membawa dampak negatif terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi itu pun kian memicu penurunan daya beli masyarakat. Di industri perbankan, misalnya, kredit mengalami perlambatan. Kredit konsumsi dan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang awalnya diandalkan menjadi penopang pertumbuhan kredit turut melemah akibat penurunan daya beli. Bisnis UMKM tercatat menurun hingga 15%.

Penjualan properti juga melemah, yang diikuti melambatnya kredit ke sektor tersebut. Begitu pula dengan penjualan otomotif, yang ikut melemah dan memengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan dan *multifinance*.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah bertindak cepat dan menggulirkan berbagai kebijakan. Akhir Juni lalu BI



Pokok-pokok perubahan mengenai kebijakan LTV/FTV dan uang muka meliputi beberapa hal. Antara lain, satu, perubahan besaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk kredit properti syariah.

menerbitkan kebijakan pelonggaran *loan to value (LTV)* melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value (FTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Aturan yang mulai berlaku pada 18 Juni 2015 itu diterbitkan mengingat kedua sektor tersebut (properti dan otomotif) dinilai memiliki keterkaitan serta efek yang cukup besar pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Relaksasi kebijakan itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pokok-pokok perubahan mengenai kebijakan *LTV/FTV* dan uang muka meliputi beberapa hal. Antara lain, satu, perubahan besaran rasio *LTV* untuk kredit properti dan rasio *FTV* untuk kredit properti syariah. Peningkatan besaran rasio *LTV/FTV* ini mencapai 10% dan berlaku untuk rumah tipe 21 ke bawah hingga tipe 70 ke atas. Dalam arti, aturan besaran pinjaman terhadap nilai agunan dinaikkan dari 70% menjadi 80%. Sementara, untuk rumah kedua, ketiga, dan seterusnya, uang mukanya masing-masing naik 10% menjadi 30%, 40%, dan 50%.

Dua, perubahan terhadap ketentuan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB dan KKB Syariah). Kebijakan ini diberlakukan untuk kendaraan roda dua dan roda tiga ke atas. Kewajiban persentase uang muka ini diturunkan hingga 5%.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan BI dalam kebijakan tersebut. BI menyebutkan, aturan ini berlaku hanya bagi bank dengan tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) di bawah 5%.

Lalu, seberapa efektifkah kebijakan pelonggaran *LTV*? BI mengklaim bahwa pelonggaran *LTV* dapat menstimulus dan mendorong pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat setidaknya 1% hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Mei 2015 penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp1,34 triliun atau tumbuh 26,60% dibandingkan dengan posisi yang sama 2014 yang tercatat Rp1,06 triliun. Pada periode yang sama pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami koreksi sebesar 4,82%, yakni menjadi Rp1,82 triliun dari Rp1,91 triliun pada Mei 2014.

Memang, sejauh ini pelaku industri menanggapi positif diberlakukannya kebijakan pelonggaran *LTV*. Sejumlah bank, khususnya bank-bank yang fokus pada kredit properti, optimistis aturan tersebut dapat mendorong penyaluran kredit mereka. Namun, dampaknya tak terlalu dirasakan dalam waktu dekat.

PT Bank Tabungan Negara (BTN), misalnya, menganggap



Anggoro Eko Cahyo; tumbuh 8%-12%

Sejauh ini pelaku industri menanggapi positif diberlakukannya kebijakan pelonggaran *LTV*. Sejumlah bank, khususnya bank-bank yang fokus pada kredit properti, optimistis aturan tersebut dapat mendorong penyaluran kredit mereka. Namun, dampaknya tak terlalu dirasakan dalam waktu dekat.

kebijakan ini dapat makin membuka banyak kesempatan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan mudah, cepat, dan murah. “Sejauh ini kami melihat *LTV* bertujuan positif bagi industri pembiayaan perumahan. Kebijakan ini memberikan stimulus bagi tumbuhnya pemberian kredit secara nasional,” ujar Maryono, Direktur Utama BTN, medio Agustus lalu, di Jakarta.

Senada dengan BTN, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) pun optimistis pelonggaran *LTV* dapat membuat penyaluran kredit kembali bergairah pada semester kedua tahun ini. Anggoro Eko Cahyo, Direktur Konsumer BNI, berharap, pada semester kedua 2015 ada pertumbuhan di kredit konsumer BNI, kendati masih diwarnai perlambatan dan penurunan daya beli. “Kredit konsumer diharapkan dapat tumbuh di kisaran 8% hingga 12% hingga akhir tahun ini,” imbuh Anggoro.

Hingga semester pertama 2015, penyaluran kredit BNI mencapai 12,1%. Sementara, pertumbuhan kredit konsumernya mencapai 10,6%.

Pendapat sedikit berbeda dikemukakan Endy Abdurrahman, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Menurutnya, pelonggaran *LTV* yang dirilis BI ini momentumnya kurang tepat di tengah menurunnya daya beli masyarakat di Tanah Air. Hal itu menyebabkan pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap penyaluran kredit. Namun, Endy memproyeksikan dampaknya secara signifikan akan terasa dalam beberapa bulan ke depan.

Senada dengan Endy, para pelaku di industri perusahaan pembiayaan atau *multifinance* pun menilai bahwa kebijakan

ini tak berpengaruh banyak terhadap penyaluran kredit otomotif. Di perusahaan pembiayaan, selain pelonggaran *LTV*, ada pula kebijakan baru dari OJK terkait dengan perluasan usaha perusahaan pembiayaan. Namun, dua kebijakan itu belum secara optimal menstimulus pembiayaan. Lagi-lagi, karena masih adanya penurunan daya beli masyarakat.

Menurut data OJK, posisi piutang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang didominasi pembiayaan kendaraan hingga April 2015 tercatat tumbuh 7,14% secara *year on year (yoy)* menjadi Rp246,14 triliun. Pangsa pembiayaan konsumen mencapai 66,56% terhadap total piutang pembiayaan.

Menurut Wiwie Kurnia, Presiden Direktur Mega Central Finance (MCF), tahun ini pembiayaan kendaraan berpotensi mengalami penurunan atau koreksi. “Pertumbuhan pembiayaan kendaraan tahun ini hanya akan mencapai sekitar 5% hingga 8% atau menurun dari target awal yang sekitar 10%,” imbuhnya. ■

Indonesia Mampu Hadapi Tantangan Global

Globalisasi telah membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Walau banyak tantangan, Indonesia dinilai Christine Lagarde, *Managing Director* IMF, mampu menghadapinya.



Selain membangun infrastruktur kelas dunia, Indonesia perlu mengedepankan kebijakan yang inklusif—memberikan akses kepada setiap potensi untuk berkembang—agar bisa mencapai pertumbuhan tinggi di sektor perdagangan dan investasi.

Pada bagian awal kuliah umumnya, Lagarde memaparkan sejumlah persoalan terkini yang terjadi di panggung ekonomi global dan akan berdampak signifikan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dengan hal itu, menurut Lagarde, seperti negara berkembang lainnya, Indonesia perlu mencermati beberapa hal, di antaranya penurunan pertumbuhan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok (RRT), perlambatan pertumbuhan perekonomian global, dan perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Perekonomian RRT saat ini berada dalam masa transisi. Pemerintah RRT telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam

Dalam kunjungannya ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan IMF-Bank Indonesia, High Level Conference on the Future of Asia's Finance, Christine Lagarde, *Managing Director* International Monetary Fund (IMF), menyempatkan diri memberikan kuliah umum di depan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) di kampus UI, Salemba, Jakarta, pada 1 September 2015. Pada kesempatan itu, Lagarde membagi visinya mengenai revitalisasi pertumbuhan global, yang menurut dia akan memberi kesempatan pada perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh berkesinambungan.

Dalam kuliah umum yang bertema “*Poised for Take-off- Unleashing Indonesia's Economic Potential*”, Lagarde menekankan bahwa Indonesia berpeluang untuk menjadikan dinamika ekonomi global saat ini sebagai momentum untuk memperbarui sumber pertumbuhan ekonomi agar mampu menciptakan target yang lebih tinggi pada masa mendatang.

perekonomiannya—untuk menuju perekonomian berbasis pasar dan dalam penyesuaian ke model pertumbuhan baru ini, laju pertumbuhan ekonomi RRT diperkirakan akan melambat. Diperkirakan RRT mempunyai instrumen kebijakan dan kekuatan finansial yang cukup untuk mengelola transisi ini. Kendati demikian, Indonesia sebagai salah satu mitra utama RRT harus siap menghadapi tantangan yang muncul dari proses transisi tersebut.

Pada saat yang bersamaan harga komoditas di pasar dunia sudah mengalami puncak penurunan dan diproyeksikan harga-harga masih akan bertahan pada level saat ini. Itu berarti permintaan eksternal bagi Indonesia masih akan lemah.

Selanjutnya, Indonesia perlu mengantisipasi pemulihan ekonomi AS. Pemulihan ini akan menyebabkan The Fed sebagai bank sentral AS akan menaikkan suku bunganya dan ini bisa menyebabkan gejolak atau volatilitas keuangan global masih akan terus berlangsung. “Perkembangan keuangan global masih tetap mengkhawatirkan, tapi Indonesia

mempunyai pengalaman yang cukup dalam menghadapi ini seperti yang terjadi pada 2013,” terangnya.

Hal yang Mesti Dilakukan

Lagarde percaya bahwa salah satu potensi terbesar Indonesia ialah sumber daya manusia (SDM) usia muda yang tersedia dalam jumlah besar. Berbeda dengan negara lain di kawasan ASEAN yang mengalami penurunan, jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan terus meningkat. Diperkirakan pada 2030 mendatang, 70% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 180 juta jiwa adalah mereka yang berada pada usia produktif.

Dengan potensi SDM yang begitu besar, Indonesia memiliki peluang yang unik yang tidak dimiliki semua negara dalam mengatasi perlambatan ekonomi dunia saat ini.

Lagarde menilai ada tiga langkah penting yang harus dilakukan untuk merealisasikan potensi tersebut. Pertama, pembangunan infrastruktur yang modern dan efisien, terutama listrik dan transportasi. Kurangnya infrastruktur yang memadai membuat sektor lain tidak efisien, misalnya biaya logistik yang diestimasikan 24% dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan 13% di Malaysia dan akses listrik bagi masyarakat di Indonesia baru 80% dibandingkan dengan hampir 100% di negara lain yang serupa. Mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses listrik bagi penduduk Indonesia akan menciptakan pekerjaan di semua sektor, mengurangi harga-harga di daerah, dan meningkatkan konektivitas ke pasar global.

Kedua, memperbaiki iklim investasi yang kondusif bagi penyerapan teknologi baru dan kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi banyak barang dan jasa, seperti yang dilakukan negara-negara lain. Lagarde memberi apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi, seperti penyelesaian masalah lahan untuk infrastruktur dan pelayanan terpadu satu pintu.

Ketiga, semua itu harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung proses integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia. Potensi yang terbuka bagi Indonesia bukan saja pasar domestik yang besar, melainkan juga pasar global dengan 1,5 miliar konsumen.

Selain itu, Lagarde menyoroti empat tantangan krusial yang akan dihadapi negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Empat tantangan ini harus diatasi negara di kawasan Asia jika ingin menciptakan sistem keuangan yang dapat membangun stabilitas dan bahan bakar untuk menuju kesuksesan pada masa mendatang. “Saya telah mengelompokkan tantangan-tantangan ini sebagai empat ‘i’, yaitu inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inklusi,” jelasnya.

Untuk inovasi, menurutnya, sektor keuangan di Asia telah mendukung pertumbuhan yang luar biasa dan sektor keuangan sendiri telah bertransformasi seiring dengan perkembangan



Christine Lagarde; cermati beberapa hal

yang ada. Namun, sektor keuangan perlu mengikuti atau mencontoh sektor manufaktur di Asia, yang terus menuju produk dengan nilai tambah lebih dan proses yang lebih efisien.

Sistem atau pasar keuangan yang lebih dalam dapat memberikan perisai terhadap volatilitas, tapi juga harus mengatur sistem keuangan dengan baik. Itu berarti harus waspada untuk sumber-sumber risiko sistemik baru seperti *shadow banking*.

Selanjutnya, integrasi untuk menciptakan sinergi pasar. Asia telah membuat langkah besar dalam menciptakan hubungan perdagangan regional yang telah memacu vitalitas

ekonomi. Menurutnya, saat ini adalah waktunya untuk menyuntikkan vitalitas yang sama ke dalam hubungan untuk keuangan regional mengatasi warisan pasar terfragmentasi dan membangun sinergi antarlembaga keuangan dan pasar modal.

Ambil contoh ASEAN. Daerah ini memiliki populasi gabungan dari 600 juta orang dan PDB sebesar US\$2,5 triliun. Perdagangan intra-regional telah berkembang dengan pesat, membawa manfaat bagi pasar dan perbatasan negara berkembang sama. “Integrasi keuangan yang lebih besar dapat memajukan proses ini dengan menciptakan pasar modal yang lebih besar dan lebih likuid yang mengurangi biaya modal,” tambahnya.

Kemudian, infrastruktur, yang merupakan kunci untuk masa depan Asia. Untuk ekonomi perbatasan, perbaikan jalan, kereta api, dan pelabuhan, serta pasokan baru dari air dan listrik akan membangun blok pembangunan baru. Untuk pasar negara berkembang, kota layak huni dengan transportasi umum yang layak dan jaringan TI canggih dapat membantu menghindari “*middle income trap*”.

Yang terakhir ialah inklusi. Di samping kemajuan Asia, hampir 350 juta orang Asia masih hidup dalam kemiskinan. Kebanyakan tidak memiliki rekening bank. Banyak perusahaan mengalami kesulitan mengakses pinjaman bank dan modal investasi. Banyak yang hidup di pasar negara berkembang, tapi bukan bagian dari kemakmuran itu.

Lagarde menilai, inklusi keuangan tidak hanya soal produk atau peraturan. Namun, langsung meningkatkan mata pencarian dan mengurangi kemiskinan. Ini adalah penyediaan layanan dan penciptaan kesempatan, dalam hal ini ada ketimpangan-ketimpangan pendapatan dan jenis kelamin, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di banyak negara merupakan hambatan bagi kesuksesan Asia.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akses yang lebih besar ke layanan keuangan dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan dapat berperan dalam memajukan stabilitas sektor keuangan. “Saya sangat terkesan dengan inisiatif inklusi yang kita lihat di seluruh Asia. Misalnya, komitmen pemerintah untuk ekspansi yang cepat dari layanan keuangan kepada lebih luas penduduk di Indonesia, dan program nasional India untuk memperluas akses ke rekening bank dengan kartu identifikasi biometrik,” tandasnya. ■

Upaya Perbanas Dorong Keuangan Inklusif

Akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk perbankan, hingga saat ini masih dinilai rendah. Berbagai upaya program keuangan inklusif pun ditempuh untuk meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan perekonomian nasional.



Minat masyarakat kita menggunakan fasilitas perbankan masih relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat negara lain. Karena itu, perlu usaha ekstra dari segenap *stakeholders* untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ketika membuka “Indonesia Banking Expo (Ibex) 2015”, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang inklusi keuangannya masih rendah. “Baru 54% masyarakat yang punya akses ke lembaga keuangan formal. Jadi, masih ada 46% yang perlu dijangkau,” ujarnya.

Presiden mengatakan, pemerintah ingin agar semua masyarakat Indonesia memiliki keterhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan begitu, perbankan akan menjadi motor dalam memobilisasi pendanaan untuk tujuan pendanaan ataupun investasi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, yakni hanya sebesar 21,8%, dengan tingkat inklusi sebesar 59,7%. Indeks literasi masyarakat berprestasi rendah sebesar 18,71%.

Untuk perbankan, tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan hanya 22%, sementara tingkat utilitas dan pemanfaatannya baru 57%. Sektor ini memiliki nilai literasi keuangan yang paling tinggi. Kendati demikian, segenap *stakeholders* di industri ini terus berupaya meningkatkannya.

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 250 juta jiwa dengan usia produktif sekitar 157 juta jiwa semestinya menjadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan semua sektor industri keuangan, khususnya perbankan. Memang, masih ada beberapa kendala yang dihadapi perbankan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses produk perbankan.

Dia juga mengatakan, perlu langkah terobosan untuk literasi dan keuangan inklusif di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, juga daerah perbatasan yang belum terjangkau layanan perbankan. Salah satu contohnya ialah penggunaan kapal perbankan untuk wilayah kepulauan dan mobil perbankan untuk wilayah perbatasan. Selain itu, perlu pemanfaatan teknologi untuk menjangkau masyarakat tanpa harus membangun kantor cabang. “Saya harapkan mobil dan kapal tidak hanya melayani perbankan, tapi juga memberikan edukasi agar masyarakat melek bank,” harapnya.

Program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan memang menjadi perhatian setiap pelaku industri perbankan. Melalui program itu, masyarakat diharapkan mampu menggunakan produk perbankan kapan saja dan di mana saja. Ini juga menegaskan keuangan yang inklusif bahwa produk perbankan merupakan produk yang bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat.

Untuk mencapai keuangan inklusif, perbankan digital (*digital banking*) menjadi salah satu tumpuan dalam akses keuangan yang lebih merata. Melalui infrastruktur dan

teknologi informasi (TI) yang sudah ada, seperti telepon seluler dan perangkat berbasis internet, perbankan digital akan menjadi langkah yang efisien untuk meningkatkan literasi keuangan.

Terkait dengan hal tersebut, Ibox 2015 pun mengusung *digital banking* sebagai tema utama. Acara yang didukung oleh berbagai lembaga itu memang diharapkan kian membesarkan keuangan inklusif. Tidak hanya untuk meningkatkan literasi keuangan, acara tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum.

Salah satu pelaku industri yang gencar menggalakkan program keuangan inklusif ialah Bank Central Asia (BCA). Presiden Direktur BCA, Jahja Setiatmadja, mengatakan, beberapa tantangan selalu dihadapinya dalam mengembangkan perbankan digital. Memberikan pelayanan yang maksimal agar tidak terjadi *delay* dalam transaksi adalah salah satu hal yang sampai dengan saat ini menjadi perhatian perusahaan.

“Kami juga dituntut untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai aspek keamanan. Masalahnya, mereka terbiasa untuk mengunduh berbagai hal dari internet, termasuk *malware* yang berbahaya,” ujar Jahja.

Menurutnya, perbankan digital menawarkan kemudahan yang besar sehingga akan mampu mewujudkan *cashless society* di Tanah Air. Hal ini perlu dukungan yang besar dari setiap *stakeholders*, para pelaku industri, dan seluruh lapisan masyarakat.

Masih menurut Jahja, transaksi perbankan digital di dalam negeri masih sangat sedikit, tapi memakan biaya operasional yang sangat tinggi. Keuntungan yang didapatkan perbankan juga tidak banyak, hanya berupa saldo yang jumlahnya terbatas antara Rp1 juta dan Rp5 juta jika nasabahnya terdaftar.

Hubungan antara nasabah dan perbankan yang tidak langsung merupakan tantangan lain yang dihadapi perbankan dan ini menjadi kesulitan bagi bank-bank berskala kecil dan menengah. Kendati demikian, Jahja terus berkomitmen untuk terus melakukan investasi dalam peningkatan perbankan digital guna meningkatkan keuangan yang inklusif. Dia optimistis, perbankan digital akan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengatakan, perbankan digital memang menjadi isu penting dan strategis dalam pengembangan layanan perbankan ke depan. Menurutnya, semua pelaku industri harus mendukung program ini agar mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Masih menurut Maryono, pihaknya mendukung sepenuhnya program perbankan digital dan menjadikannya sebagai perhatian utama ke depan. BTN sendiri telah melangkah ke sana atas dasar kemajuan TI dan tuntutan layanan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sangat banyak dan perlu didukung layanan yang cepat oleh perbankan.



Ryan Kiryanto; mengubah perilaku warga

“Kami telah siap memberikan layanan *digital banking* ini, dengan pembukaan rekening e-KTP yang cukup menggunakan waktu tidak lebih dari empat menit. Layanan berbasis *digital banking* ini akan diteruskan pada rekening genggam, portal pembayaran semua jenis *ticketing* dari yang saat ini sudah dapat dilayani untuk tiket kereta api. Menyusul pembayaran untuk tiket pesawat udara, kapal laut, dan lainnya. Kami akan terus berupaya untuk mengembangkan *IT* untuk mendukung layanan produk BTN berbasis *digital banking*,” jelasnya.

Mengembangkan *Smart City*

Selain mengembangkan perbankan digital, Ibox kali ini menasar pengembangan kota untuk menjadi *smart city*. Itu lantaran, *smart city* akan mendukung ekspansi perbankan dalam mengumpulkan data dan informasi setiap penduduknya. Pengembangan kota juga bisa menjadi sasaran perbankan dalam penyaluran kreditnya.

Guru besar Sekolah Teknik Electro dan Informatika (STEI) ITB, Suhono Harso Supangkat, mengatakan, perbankan merupakan bagian terpenting dari pengembangan *smart city* dan segala fasilitasnya. Menurutnya, perbankan akan dapat mendorong efisiensi dengan sistem digitalisasinya sehingga menjadi dukungan yang penting dalam penerapan *smart city*.

Meskipun begitu, tantangan tetap selalu ada dalam pengembangannya. Sampai dengan saat ini, masih belum ada platform yang dapat menggabungkan layanan pembayaran. Diversifikasi yang dimiliki perbankan justru meningkatkan biaya dan di lain sisi masyarakat yang memanfaatkan fungsi tersebut masih belum banyak.

“Selain itu, *smart city* tidak hanya menitikberatkan pada teknologi, tetapi pada pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga warga dapat hidup aman dan nyaman juga berkelanjutan. *Smart city* juga bukan *city* ditambah *CCTV* dan internet, melainkan menggerakkan orangnya. Jadi, pemimpin mengetahui situasi dan masalah-masalah yang ada, kemudian menggerakkan birokrasi. Kalau hanya beli teknologi, itu buang-buang duit,” jelas Suhono pada seminar mengenai *smart city* di Ibox 2015.

Sementara itu, ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto, mengatakan, segala kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan sistem perbankan akan mampu mengubah perilaku warga dalam pengembangan *smart city*. Menurutnya, perbankan harus terus berinovasi dan berinvestasi untuk mendukung transaksi digital tersebut. Apalagi, menurutnya, perbankan nasional tidak hanya akan bersaing dengan pemain dalam negeri, tetapi juga bersaing dengan pemain luar negeri ke depannya.

“Daya dukung lembaga keuangan, cepat atau lambat, akan mengikuti fenomena *digital banking*. Kalau tidak, nasabah yang akan pindah. Perbankan sangat dominan *market driven*, jadi bank yang tidak mengikuti akan terbunuh,” ujarnya. ■

Menjaga Kualitas Kredit

Meningkatnya risiko membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Hal itu menyebabkan penyaluran kredit melambat dan laba menipis.



kelas menengah menjadi target pasar bagi bank dalam menawarkan produk dan jasanya. Selain meningkat, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia jumlahnya cukup besar.

OJK mencatat, penyaluran kredit perbankan ke sektor rumah tangga porsinya mencapai 22,49% dari total kredit yang disalurkan perbankan. Pertumbuhannya secara tahunan mencapai 13,78%. Pertumbuhan kredit ke sektor rumah tangga ditopang oleh bertumbuhnya penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) tinggal, kredit pemilikan ruko atau rukan, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit pemilikan rumah tangga lainnya, termasuk kredit multiguna.

Sampai dengan triwulan ketiga 2015, KPR tercatat meningkat sebesar 8,29%. Kredit pemilikan ruko atau rukan tumbuh 2,60%. KKB tumbuh 4,30%. Sementara itu, kredit pemilikan rumah tangga, termasuk pinjaman multiguna, tumbuh 24,04%.

Selain sektor konsumsi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih prospektif bagi perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Pasalnya, sektor ini sudah teruji lebih stabil dalam menghadapi krisis. Apalagi, regulator memberikan sejumlah relaksasi kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan sektor ini.

Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit tertinggi dibukukan oleh kredit investasi, diikuti kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Hingga Agustus 2015, kredit investasi tumbuh sebesar 12,93% (*year on year* atau *yoy*) dari Rp857,83 triliun menjadi Rp968,78 triliun. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 10,49%, dari Rp1.671,46 triliun menjadi Rp1.846,73 triliun. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 9,98%, dari Rp969,07 triliun menjadi Rp1.065,78 triliun.

Selain dihadapkan dengan melambatnya pertumbuhan kredit, perbankan dihadapkan dengan memburuknya kualitas kredit yang merupakan dampak dari meningkatnya risiko. OJK mencatat, rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) bank umum trennya mengalami peningkatan dalam dua

Perlambatan ekonomi berdampak negatif terhadap kinerja perbankan. Hingga triwulan ketiga 2015, kinerja perbankan tercatat mengalami perlambatan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit bank umum hingga Agustus 2015 tumbuh sebesar 11,20%, dari Rp3.522,37 triliun pada Agustus 2014 menjadi Rp3.916,70 triliun.

Melambatnya kinerja bisnis perbankan sejatinya telah dirasakan sejak tahun lalu sejalan dengan tekanan ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Kendati mengalami tekanan, kinerja kredit perbankan masih membukukan pertumbuhan positif.

Jika dilihat berdasarkan sektor, ada lima sektor yang mendorong pertumbuhan kredit perbankan, yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor konstruksi; serta sektor perikanan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan pangsaanya, tiga besar ditempati oleh sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Sektor konsumsi adalah salah satu sektor yang masih potensial bagi perbankan. Meningkatnya populasi masyarakat

tahun terakhir, yakni 1,77% pada 2013, 2,16% pada 2014, dan 2,76% pada Agustus 2015.

Berdasarkan data OJK, ada lima sektor penyumbang pertumbuhan kredit bermasalah, yaitu (1) sektor listrik, gas, dan air; (2) sektor administrasi pemerintahan; (3) sektor pertambangan dan penggalian; (4) sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum; dan (5) sektor pengolahan. Dari 18 sektor yang dikelompokkan oleh OJK, ada 9 sektor yang *NPL gross*-nya mengalami kenaikan, di antaranya sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor transportasi.

Sementara itu, jika dilihat dari rasionya, hanya ada satu sektor yang *NPL*-nya melebihi ambang batas yang ditentukan regulator sebesar 5%, yakni sektor konstruksi. Per Agustus 2015 *NPL gross* sektor konstruksi mencapai 5,46% atau naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,60%.

Dari sektor rumah tangga, kenaikan *NPL* disumbang oleh KPR, diikuti kredit pemilikan ruko dan rukan, serta KKB. *NPL* KPR naik dari 2,55% menjadi 2,73%. *NPL* kredit pemilikan ruko dan rukan naik dari 2,59% menjadi 3,43%. Sementara itu, *NPL* KKB naik dari 1,19% menjadi 1,40%.

Sebagai penjaga gawang industri keuangan, OJK pun merespons serius tren kenaikan *NPL* ini. OJK berharap pelaku industri perbankan dapat menekan *NPL*-nya. "Kami berharap, *NPL* pada akhir tahun bisa di bawah 3%" harap Irwan Lubis, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK.

Di satu sisi, melambatnya penyaluran kredit diindikasikan sebagai langkah bank dalam menjaga kualitas kreditnya. Bank cenderung selektif dalam mengucurkan kredit. Mereka menghindari sektor yang cenderung terdampak oleh perlambatan ekonomi, seperti sektor pertambangan dan pengolahan. Hal itu dilakukan untuk menekan potensi kenaikan *NPL*.

Perlambatan kredit dan meningkatnya *NPL* memang berdampak pada laba perbankan yang mengalami penurunan. Hingga Agustus 2015, laba bank umum tercatat tumbuh negatif 8,94% secara tahunan.

Untuk mendongkrak pendapatan, sejumlah bank pun gencar mendulang rupiah dari *fee based income* melalui sektor *consumer banking*. Pengguna *digital banking* merupakan salah satu pasar yang dibidik bank. Pasalnya, dari situ bank berpeluang mendongkrak *fee based income* yang akan berkontribusi terhadap laba.

Mengempisnya laba juga dipicu oleh tingginya biaya dana. OJK mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank umum pada triwulan ketiga tumbuh lebih tinggi ketimbang laju kredit. Hingga Agustus 2015 penghimpunan DPK perbankan mencapai Rp4.366,57 triliun atau tumbuh sebesar 13,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3.856,06 triliun. Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan deposito yang pada Agustus 2015 mencatatkan kenaikan sebesar 23,62% secara tahunan. Sementara itu, giro dan tabungan secara tahunan masing-masing tumbuh sebesar 14,38% dan 4,17%.

Dari sisi dana, tahun ini perbankan juga menghadapi tantangan akses likuiditas. Bank Indonesia (BI) menyebutkan, perbankan memiliki akses likuiditas yang cukup besar. Dana-dana perbankan tersebut banyak ditempatkan dalam *deposit*

NPL BANK UMUM BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN (RP MILIAR)

	AGUSTUS 2015	NPL(%)
MODAL KERJA	1.846.734	3,24
INVESTASI	968.780	2,94
KONSUMSI	1.065.780	1,76

Sumber : Bank Indonesia, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (bir)

facility dan instrumen lainnya. Berdasarkan data BI, dana perbankan yang disimpan di BI mencapai Rp190 triliun.

Kendati demikian, secara umum, hingga triwulan ketiga 2015, ketahanan sektor perbankan masih terjaga di tengah melambatnya ekonomi. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) yang masih kuat, jauh di atas ketentuan minimum 8%, yaitu sebesar 20,73%. Rasio kredit bermasalah kendati meningkat, angkanya masih di bawah 5%, yakni berada di level 2,76% (*gross*). Perbankan juga masih konsisten menjalankan fungsi intermediasi yang tercermin dari *loan to deposit ratio* (*LDR*) yang berada di level 88,81%.

"Tahun ini rentabilitas bank pasti turun karena harus membentuk tambahan cadangan," imbuh Irwan. Karena itu, OJK mengeluarkan aturan relaksasi restrukturisasi kredit. Dengan aturan itu, *NPL* perbankan diharapkan bisa turun sebesar 0,3%-0,5%.

Untuk mendorong kinerja perbankan, OJK merilis 12 paket kebijakan perbankan. Dalam kebijakan tersebut, OJK kembali menyasar UMKM sebagai targetnya. OJK memberikan kelonggaran penyaluran kredit bagi pelaku UMKM, di antaranya penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5 miliar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Pemerintah juga memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 12% dan melakukan perluasan kredit penerima KUR.

Masih dalam rangka mendorong kredit, regulator juga melonggarkan ketentuan *loan to value* (*LTV*). Kebijakan ini dirilis untuk mendorong penyaluran kredit konsumsi, khususnya KPR dan KKB.

Pada 2016 perbankan masih harus menghadapi perlambatan ekonomi sehingga langkah meningkatkan kualitas kredit masih akan dilakukan. Selain itu, ada agenda penting yang wajib dipenuhi perbankan tahun depan, yakni memenuhi ketentuan permodalan versi Basel III yang dilakukan secara bertahap hingga 2019.

Dalam Basel III, perbankan diminta untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang terdiri atas *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge*. Target dari implementasi Basel III ialah meningkatkan kualitas modal bank sesuai dengan standar internasional, meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap risiko, dan memastikan kesehatan bank dari dampak sistemik. ■

Upaya Meningkatkan Suplai Valas

Di tengah lesunya perekonomian nasional, OJK memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Salah satunya dengan merilis aturan untuk memberikan kemudahan kepada WNA yang akan membuka rekening valas.

Pada pertengahan September 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan berupa surat edaran (SE) mengenai penyederhanaan pembukaan rekening valuta asing (valas) untuk perorangan bagi warga negara asing (WNA). Aturan tersebut tertuang dalam SE Nomor S-246/S.01/2015 tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad. Aturan tersebut sudah dikirimkan kepada seluruh direksi bank umum yang melakukan kegiatan usaha dalam valas.

Menurut Muliaman, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian atau tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September lalu, yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaring dana valas para WNA yang masuk ke sistem perbankan Indonesia sehingga dapat meningkatkan suplai valas melalui penambahan simpanan valas perbankan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat WNA untuk berinvestasi dan/atau berwisata di Indonesia.

Selama ini pembukaan rekening bagi WNA dinilai tidak sederhana dan banyak persyaratan. Untuk membuka rekening, WNA harus menyertakan banyak dokumen selain paspor, seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan dokumen penunjang lainnya dalam rangka *customer due diligence* (CDD). Adanya kemudahan dalam aturan itu diharapkan akan mendorong WNA, khususnya *frequent visitors*, untuk membuka rekening valas di bank lokal.

Ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut mencakup beberapa hal. Satu, untuk rekening turis dengan saldo terbatas antara US\$2.000 dan US\$50.000, yakni persyaratan pembukaan rekening dalam rangka CDD, cukup dengan menunjukkan identitas berupa paspor. Setoran pertama



Selama ini pembukaan rekening bagi WNA dinilai tidak sederhana dan banyak persyaratan. Untuk membuka rekening, WNA harus menyertakan banyak dokumen selain paspor, seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan dokumen penunjang lainnya dalam rangka *customer due diligence* (CDD).

minimal US\$2.000 dan saldo maksimal US\$50.000. Saldo di bawah US\$10.000 dikenai *charges* lebih tinggi.

Dua, untuk rekening WNA dengan saldo tidak terbatas, yakni persyaratan pembukaan rekening dalam rangka *CDD* menggunakan paspor dan satu dokumen tambahan tertentu, misalnya referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitas istri, fotokopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/debit. Ini berlaku untuk saldo lebih dari US\$50.000.

Tiga, untuk rekening WNA dengan saldo khusus atau jumlah besar dengan saldo lebih dari US\$1 juta, yakni persyaratan pembukaan rekening dalam rangka *CDD* menggunakan paspor dan dokumen tambahan tertentu, misalnya referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitas istri, fotokopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/debit. Ini diprioritaskan bagi bank-bank tertentu yang memenuhi syarat manajemen risiko dan kehati-hatian perbankan. Untuk pajak bunga deposito lebih rendah daripada pajak pada umumnya dan diterapkan secara progresif (lebih banyak saldo, lebih rendah pajaknya).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, peraturan mengenai penyederhanaan rekening valas oleh perorangan yang berkewarganegaraan asing itu diyakini akan membuat turis atau warga asing, utamanya *frequent visitor*, menempatkan uangnya di bank-bank dalam negeri.

“Misalnya di sini ada anaknya kuliah atau ada bisnis kecil-kecilan di Mangga Dua. Daripada dia bawa (uang) *cash*, harus cari *money changer*, mending dia buka rekening di sini. Lainnya, misalnya tetangga punya rekening di negara tetangga, katakanlah dia simpan Singapore *dollar*, kalau dia taruh di sana tabungan, ‘*kan praktis enggak* ada hak. Kalau dia buka di sini *spread*-nya ‘*kan signifikan*. Jadi, itu daya tarik juga,” jelas Nelson.

Potensi rekening WNA tersebut cukup besar, dengan jumlah pengunjung pada 2014 mencapai 12 juta orang. Diperkirakan 20% adalah *frequent visitor* atau sekitar 2,4 juta pengunjung. Potensi 2,4 juta tersebut diharapkan membuka rekening valasnya di Indonesia. “Kalau misalnya per orang buka rekening valas US\$10.000, kita hitung saja,” tambah Nelson.

Ketua Komisi XI DPR-RI, Fadel Muhammad, mendukung langkah OJK terkait dengan peraturan penyederhanaan pembukaan rekening valas bagi WNA yang berada di Indonesia. “Langkah OJK itu bagus karena ini merupakan langkah terobosan dalam memperbanyak orang asing untuk membuka *account* di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, dengan relaksasi aturan pembukaan rekening valas bagi WNA, jumlah *account* yang bisa dijarah dari WNA



Nelson Tampubolon; menjadi daya tarik

Potensi rekening WNA tersebut cukup besar, dengan jumlah pengunjung pada 2014 mencapai 12 juta orang. Diperkirakan 20% adalah frequent visitor atau sekitar 2,4 juta pengunjung.

sangatlah besar. “Contohnya saja, berapa ribu ekspatriat yang sudah bekerja di Indonesia, itu banyak,” tukas Fadel.

Hal senada diungkapkan Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR-RI. Mukhamad Misbakhun menilai, selama ini banyak WNA yang enggan untuk membuka rekening valas di Indonesia lantaran persyaratan yang begitu rumit. Padahal, potensi valas yang bisa dijarah dari WNA ini sangatlah besar.

“Dengan kemudahan ini, maka cukup paspor saja, akan sangat memudahkan bagi WNA untuk membuka rekening di Indonesia. Dan, saya optimistis potensi valas yang bisa dijarah cukup besar,” ujar Misbakhun.

Terlebih, dalam aturan tersebut, OJK telah memberikan penggolongan yang fleksibel bagi WNA yang akan membuka rekeningnya. Pembatasan pun dinilai tidak memberatkan WNA, bahkan akan sangat membantu.

Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan OJK tersebut akan berdampak langsung bagi sistem keuangan nasional dan pada gilirannya akan ikut membantu terciptanya stabilitas makroprudensial. “Kebijakan OJK itu langsung menyentuh masyarakat dan memberikan dampak sehingga saya kira relaksasi aturan valas ini akan sangat membantu bagi pasokan valas

di dalam negeri,” ucapnya.

Sementara itu, kalangan bankir, seperti Herwidayatmo, Presiden Direktur Bank Pan Indonesia (Panin Bank), berharap aturan OJK itu nantinya akan tetap sinkron dengan aturan sebelumnya dari Bank Indonesia (BI) tentang *know your customer (KYC)*. “Kita *sih* dukung saja karena di satu sisi ada aturan ini, pada zaman dulu ada aturan *KYC*. Mudah-mudahan ada kesinkronan,” kata Herwidayatmo.

Sebenarnya hingga saat ini, masih menurut Herwidayatmo, likuiditas perbankan masih cukup longgar, termasuk likuiditas valas. Potensi rekening, seperti rekening turis, menurutnya, sangat tergantung pada jumlah para pelancong asing yang berkunjung dan pekerja asing yang bekerja di Indonesia. “Turis ‘*kan jangka pendek*. Itu pun *spot* tertentu. Tapi, boleh juga,” ucapnya.

Memang, aturan ini bagi sebagian kalangan dinilai tidak terlalu signifikan sebagai upaya meningkatkan simpanan valas di negeri ini. Hal itu diungkapkan Raden Pardede, ekonom. Dia menilai, aturan penyederhanaan pembukaan rekening untuk pelancong luar itu masih seperti “jauh panggang dari api” untuk mendorong pasokan valas di Indonesia. “Itu tidak signifikan,” tandasnya ketika ditemui usai menghadiri “Indonesia Banking Expo”, Rabu, 9 September 2015. Ia lebih setuju mengoptimalkan devisa hasil ekspor (DHE) para eksportir untuk ditempatkan di bank dalam negeri. ■

Catherine Hadiman,
Komisaris Independen BTN

Menjaga Performa di Tengah Kelesuan

Walau perlambatan ekonomi berdampak pada bisnis perbankan di Tanah Air, perbankan harus tetap bergerak dan menjaga performa. Langkah yang bisa dilakukan ialah memperbaiki kualitas kredit dan struktur likuiditas serta meningkatkan kompetensi SDM.

Perlambatan ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini berdampak pada bisnis perbankan nasional. Selain terjadi perlambatan kredit, imbasnya ialah meningkatnya rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)*.

Pada 2015 target penyaluran kredit bank diperkirakan tidak akan tercapai. Menurut Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit bank tahun ini hanya akan mencatatkan pertumbuhan sebesar 11%-13%, di bawah target yang dicanangkan sebesar 15%-17%. Hingga posisi Agustus 2015, total penyaluran kredit bank mencapai Rp3.881,29 triliun atau tumbuh 10,95% secara *year on year (yoy)*.

Sementara itu, peningkatan *NPL* telah dirasakan bank sejak tahun lalu dan terus meningkat hingga saat ini. Per Agustus 2015 *NPL* bank telah mencapai angka 2,76%, meningkat dari periode yang sama 2014 yang tercatat 2,16%.

Menurut Catherine Hadiman, Komisaris Independen Bank Tabungan Negara (BTN), perbankan nasional saat ini tidak bisa melawan arus perlambatan yang terjadi. "Kita *enggak* bisa melawan arus dan tidak bisa dipaksakan, tapi bagaimana menjaga performa bank tetap harus dilakukan. Barangkali di tengah situasi yang sedang tidak kompetitif untuk berlomba menyalurkan kredit, bank bisa memperkuat *structure liabilities* masing-masing," terangnya.

Selain itu, bank bisa meningkatkan kreditnya secara selektif dan lebih *prudent* serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. Sehingga, ketika bisnis kembali normal, SDM yang ada jauh lebih andal. Lantas, seperti apa potensi dan langkah yang akan ditempuh perbankan nasional ke depan? Simak wawancara *Probank* dengan Catherine Hadiman berikut ini. Petikannya:

Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan perbankan nasional?

Secara keseluruhan, perbankan Indonesia sudah jauh lebih

baik dari segi *good corporate governance (GCG)*, *risk management*, sistem, *people*. Setelah krisis ekonomi 1998, tatanan perbankan Indonesia sudah lebih kuat. Hal ini dibuktikan dengan telah terjadinya beberapa gelombang masalah ekonomi, seperti masalah yang melanda *capital market* pada 2005, terutama turunnya harga-harga obligasi sehingga banyak reksa dana yang dijual melalui perbankan turun signifikan nilainya.

Kemudian, dampak *subprime mortgage* di US (Amerika Serikat atau AS) pada 2008 yang menyebabkan ketatnya likuiditas dana valas, khususnya USD (dolar AS) di Indonesia. Terbukti, perbankan di Indonesia dapat tetap sehat dalam kondisi sulit tersebut karena setelah krisis 1998 otoritas dan pelaku perbankan telah banyak melakukan pembenahan diri sehingga lebih *prudent* dalam menjalankan bisnis.

Dampak perlambatan ekonomi terhadap perbankan nasional?

Beberapa tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan. Berawal dengan turunnya harga komoditas dan ekspor, berlanjut dengan turunnya konsumsi domestik sehingga *demand* kredit perbankan juga turun. Dengan makro-ekonomi yang kurang kondusif, maka perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Apalagi, saat ini kredit bermasalah bank-bank sedang meningkat karena banyak perusahaan, baik besar, menengah, maupun kecil, mengalami penurunan penjualan dan kinerja keuangan. Sebenarnya likuiditas perbankan saat ini tidak ketat. Banyak bank yang punya likuiditas lebih dari cukup, tapi penyalurannya saja yang ditahan karena bank-bank saat ini sangat selektif dalam menyalurkan kreditnya untuk menghindari peningkatan *NPL*.

Bagaimana mengantisipasi gejala ekonomi sekarang ini?

Kita tidak bisa melawan arus, tapi bagaimana menjaga performa dan kinerja keuangan bank tetap harus dilakukan. Di tengah situasi yang sedang tidak kompetitif untuk berlomba

menyalurkan kredit, bank bisa memperkuat dan memperbaiki struktur pendanaan, melakukan efisiensi di berbagai bidang, meningkatkan kualitas SDM-nya dengan memperbanyak *coaching* dan *training*, serta mempersiapkan diri untuk memasuki era *digital banking*.

Bagaimana dengan peluang dan potensi program pemerintah di industri maritim?

Bank-bank di Indonesia belum banyak terlibat dalam pembiayaan aktivitas yang terkait dengan industri maritim karena banyak bank yang belum mempunyai karyawan yang ahli di industri ini. Bank melihat usaha di bidang maritim mempunyai risiko yang tinggi karena tergantung pada kondisi alam/cuaca.

Oleh karena itu, penanganannya harus khusus, dan bank membutuhkan tenaga *expertise* di bidang ini. Biasanya, apabila bank tidak terlalu memahami industri yang dibiayai, maka jaminan *fixed asset* merupakan salah satu syarat utama dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, sulit biasanya bagi nelayan kecil maupun besar untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari bank.

Beberapa bank telah melakukan pembiayaan untuk perusahaan *cold storage* dan galangan kapal karena kegiatan usaha ini lebih mudah dimengerti dan diikuti perputaran bisnisnya oleh bank serta biasanya mereka lebih memiliki *fixed asset* yang bisa dijamin ke bank. Di industri maritim, galangan kapal merupakan salah satu subindustri yang memiliki prospek yang baik dan menjadi peluang bagi pembiayaan bank.

Bagaimana kesiapan perbankan menghadapi MEA?

Perbankan Indonesia harus terus meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara tetangga. Pasar perbankan Indonesia sendiri masih sangat luas dan masih banyak yang belum tergarap. Bank lokal, untuk tetap menang dalam kompetisi dari pelaku bank regional maupun global, dapat lebih memfokuskan pada pasar UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan *retail*. Dalam menggarap pasar UMKM dan *retail*, tidak hanya dalam pemberian kredit, tapi juga *cross selling* untuk produk dan jasa perbankan lainnya. Salah satu keuntungan memiliki nasabah UMKM, biasanya mereka lebih loyal dan tidak mudah pindah ke bank lain.

Mengapa SDM sangat penting untuk disiapkan?

Industri perbankan merupakan industri jasa yang tentunya sangat tergantung pada kualitas SDM. Dengan adanya MEA dan era globalisasi yang semakin meluas, saya tidak tahu apakah di masa yang akan datang peraturan tenaga kerja asing (TKA) akan diperlunak atau tidak. Sekarang ini TKA di industri perbankan tidak mudah izinnnya karena masih diatur secara ketat oleh regulator. TKA di perbankan hanya diperkenankan untuk posisi-posisi khusus yang memang tidak banyak tenaga ahlinya di Indonesia dan biasanya hanya untuk satu level di bawah direksi, direksi dan komisaris. Biasanya TKA ini juga hanya untuk sementara waktu. Mereka harus melakukan transfer *knowledge* kepada orang lokal.

Menurut saya wajar saja kalau *shareholders* dari bank tersebut menginginkan orang asing atau TKA yang menjabat apabila menurut mereka TKA tersebut lebih *capable*,



produktif, dan dapat memberikan *return* sesuai dengan yang diharapkan *shareholders*. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang lokal untuk terus meningkatkan kompetensi dan *skill* sehingga dapat lebih kompetitif daripada TKA sehingga tidak terus-menerus mengharapkan proteksi dari pemerintah atau regulator.

Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM?

Antara lain dengan mengikuti *training*, seminar, dan ada cara yang sangat efektif dan tidak memerlukan biaya besar adalah dengan *coaching* dari supervisor dan/atau para seniornya. Banyak supervisor yang melupakan salah satu kewajiban mereka yang penting ini karena sibuk dengan pekerjaan rutin dan mengejar target. Mereka lupa bahwa apabila anak buah mereka kompeten, maka pekerjaan dan target mereka juga akan lebih mudah tercapai.

Bagaimana peran regulator? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia?

Industri perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara dan aktivitas bank melibatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, peran regulator selalu diperlukan dari waktu ke waktu. Walaupun *risk management* dan *GCG* bank-bank di

Indonesia sudah jauh lebih baik, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dari otoritas agar bank selalu mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan. Untuk meningkatkan daya saing, regulator harus terus mendorong pelaku perbankan meningkatkan kualitas SDM, melakukan penguatan modal serta efisiensi, dan efektivitas operasional bank.

Bagaimana peran asosiasi?

Peran Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional) cukup signifikan. Setelah krisis ekonomi 1998, kami melihat regulator lebih terbuka dan banyak melakukan komunikasi dengan pelaku pasar, dalam artian yang positif. Sehingga, banyak peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan telah dilakukan diskusi dan meminta *input* dari pelaku perbankan, antara lain melalui diskusi dengan Tim Perbanas. Sehingga, peraturan/kebijakan tersebut dapat lebih efektif diterapkan untuk memajukan industri perbankan Indonesia dengan tetap menjalankan operasional bank secara *prudent* dan *risk management* yang terjaga. Di samping itu, antaranggota Perbanas juga dapat saling berbagi informasi, menjaga kompetisi/persaingan bank agar tetap sehat, dan bersama-sama memberikan kontribusi balik kepada masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan sosial. ■

Harus Memiliki Peran dan Kontribusi Sosial

Selain menjadi wadah bagi industri, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) didorong untuk memiliki peran sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu divisi yang bernaung di bawah Perbanas adalah Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP). Awal berdirinya KMPP ini adalah saat terjadi bencana alam yang cukup dahsyat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya sehingga menyebabkan banyak sekolah roboh dan anak-anak tidak dapat melanjutkan kegiatan sekolahnya setelah bencana alam tersebut.

Prihatin akan kondisi itu, bank-bank yang menjadi anggota Perbanas mengumpulkan dana untuk membangun sekolah-sekolah yang hancur tersebut. Saat ini Perbanas telah membantu pembangunan lima sekolah yang terkena bencana di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

KMPP tentu tidak hanya membantu sekolah yang terkena bencana alam. Sejak 2014 KMPP juga membantu pendanaan untuk operasional kegiatan pendidikan bagi sekolah anak jalanan di Jakarta yang dikenal dengan nama sekolah "SAJA". Murid-murid sekolah ini berasal dari masyarakat yang hidup di bawah kolong jembatan, yang mata pencarian orang tuanya adalah buruh dan pemulung.

Salah satu tanggung jawab Perbanas ialah memberikan edukasi mengenai perbankan kepada masyarakat seluas-luasnya agar lebih banyak masyarakat kelas bawah di Indonesia yang melek keuangan. Melalui KMPP, dilakukan kegiatan edukasi keuangan kepada murid-murid sekolah dasar (SD) dan orang tua mereka.

"Saat ini fokus edukasi keuangan kami masih pada sekolah-sekolah yang kami bantu pembangunan gedungnya. Ke depan, kami harap, kegiatan ini bisa diperluas ke sekolah-sekolah lain, dibantu oleh Perbanas daerah," tutur Catherine Hadiman, Komisaris Independen Bank Tabungan Negara (BTN). Catherine berharap, dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan KMPP, kontribusi Perbanas makin dikenal masyarakat luas, khususnya dalam mengemban aktivitas sosialnya bagi masyarakat bawah.



Hadapi Krisis, UU JPSK Mendesak

UU JPSK sangat mendesak dan dibutuhkan mengingat beberapa tahun belakangan Indonesia kerap terkena dampak krisis global. Pengalaman krisis 1997/1998 membuat pemerintah harus melakukan perbaikan di segala bidang, termasuk antisipasi menghadapi kondisi yang tidak normal.



Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral, serta kebijakan penyelesaian atau penanganan krisis. Sejatinya, UU JPSK lebih ditujukan untuk pencegahan krisis. Namun, UU tersebut juga bisa digunakan untuk penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar bagi negara. Sasaran dari JPSK ini nantinya ialah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan

memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

UU JPSK sangat mendesak dan dibutuhkan mengingat beberapa tahun belakangan Indonesia kerap terkena dampak krisis global. Memang, aturan ini telah dibahas dan dirancang sejak lama. Pada 2005 pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sudah menyusun kerangka JPSK yang akan dituangkan ke dalam rancangan undang-undang (RUU). Di dalam kerangka RUU tersebut dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disusulkan kemudian.

Kerangka RUU JPSK tersebut setidaknya memberikan landasan yang kuat bagi pihak otoritas dalam menentukan kebijakan seperti apa yang akan diambil untuk menjaga dan memelihara stabilitas

sistem keuangan. RUU JPSK tadi meliputi pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, *lender of the last resort* atau bank sentral, skim asuransi simpanan yang memadai, dan mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.

Meski kerangka RUU JPSK sudah tersusun sejak lama, masih belum ada kepastian kapan RUU tersebut disahkan menjadi UU. Pasalnya, pembahasan RUU tersebut masih banyak mengalami hambatan. Pembahasannya juga panjang sehingga tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Memang, sempat terlontar wacana bahwa UU ini akan selesai pada akhir tahun ini.

Pembahasan RUU JPSK tersebut lambat dan panjang dikarenakan semua pihak yang punya wewenang untuk mengesahkan UU ini masih belum bisa memastikan keputusan terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada untuk dirilis menjadi UU. Beberapa pihak, seperti yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), masih belum bisa memastikan krisis seperti apa yang akan dijadikan sebagai tolak ukur.

Disebutkan di dalam RUU tersebut, KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS harus bisa memastikan bahwa negara dalam keadaan krisis dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, hal ini juga masih menjadi perdebatan karena tidak semua musyawarah mufakat tersebut bisa menghasilkan keputusan yang baik dan tepat.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pembentukan RUU JPSK ini perlu segera dilakukan sebagai antisipasi atau penangkal terjadinya krisis ekonomi. Menurutnya, pengalaman krisis yang terjadi pada 1997/1998 membuat pemerintah harus melakukan perbaikan di segala bidang, termasuk untuk menghadapi kondisi yang tidak normal.

Dia menjelaskan, RUU JPSK ini harus bisa diselesaikan sebelum Indonesia berada dalam kondisi krisis yang sesungguhnya. Pasalnya, kondisi saat ini cukup membuat ekonomi Indonesia sedikit mengalami tekanan.

“Hadirnya UU JPSK ini memberi kewenangan pada instansi atau lembaga terkait untuk mengambil kewenangan dalam keadaan tidak normal maupun masalah bank berdampak sistemik dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan,” ucapnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Deputy Gubernur BI, Hendar, mengusulkan, setidaknya perlu dibentuk Badan Restrukturisasi Perbankan (BRP) yang dimasukkan ke dalam pasal khusus di dalam RUU JPSK. Badan ini akan berfungsi sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk pada 1998.

Menurutnya, BRP ini memiliki tugas menyelesaikan kesulitan yang dihadapi perbankan. BRP juga akan membantu menyelesaikan masalah perbankan yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional. “Nantinya BRP bisa diaktifkan berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh KSSK atas pertimbangan kondisi tidak normal dan ada permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian,” ujarnya.

Perbedaan pendapat selalu terjadi dalam setiap pembahasan hal penting. Hal itu juga terjadi dalam pembahasan RUU JPSK ini. Salah satunya mengenai BRP. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat bahwa lembaga seperti BRP atau



Hendar; perlu BRP

Penggunaan uang negara untuk menyelamatkan sebuah bank adalah pilihan terakhir dan ini harus dimasukkan ke dalam RUU JPSK.

BPPN (dulu) tidak perlu lagi diciptakan sekarang-sekarang ini.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, setiap bank harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada lagi uang negara yang dikeluarkan untuk menyelamatkan sebuah bank, meski bank tersebut sudah besar.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki lembaga lain yang akan menyelamatkan uang nasabah jika terjadi masalah pada suatu bank. Lembaga yang dimaksud ialah LPS. LPS akan mengganti uang nasabah yang ditempatkan di perbankan bermasalah.

“Kan sudah ada *blanket guarantee* dari LPS. Jadi, tidak perlu lagi ada lembaga-lembaga yang ikut menyehatkan perbankan. Selain itu, perbankan harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi kalau nanti diterapkan *systematically important bank (SIB)*, mereka mau tidak mau harus menyelamatkan diri mereka sendiri, setidaknya dengan cara menambah modal,” jelas Andreas ketika ditemui *Probank*, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penggunaan uang negara untuk menyelamatkan sebuah bank adalah

pilihan terakhir dan ini harus dimasukkan ke dalam RUU JPSK. Berdasarkan hal tersebut juga, KSSK sangat diperlukan sebagai pencegah terjadinya krisis. Untuk itu, tugas KSSK harus dijabarkan dengan jelas agar bisa diterapkan secara maksimal.

Masih menurut Andreas, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan KSSK dalam melakukan pencegahan krisis. Pertama, harus ada protokol pencegahan krisis yang jelas yang dimiliki oleh KSSK. Kedua, harus ada tanggung jawab yang jelas yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga, seperti BI, OJK, dan LPS. Ketiga, harus ada rencana kontingensi dari tiap-tiap bank untuk menghadapi masalah yang mereka alami.

“Saat ini, untuk pembahasan penguatan tiap-tiap lembaga, OJK, BI, dan LPS, menjadi masalah yang berat. Semuanya masih belum jelas lembaga mana yang perlu dikuatkan lagi untuk bisa memutuskan krisis atau tidak dan perbankan perlu dibantu atau tidak. Atau, malah nanti perlu dibentuk komite lainnya atau gabungan dari ketiga lembaga ini untuk membantu menangani krisis yang akan terjadi,” ujarnya.

Andreas mengatakan, jika RUU JPSK ini sudah selesai dibentuk dan bisa diterapkan, selanjutnya adalah pembahasan RUU BI, OJK, dan LPS. Menurutnya, semuanya harus dimulai dari UU JPSK yang dianggap sebagai pembuka jalan untuk UU lainnya sehingga ada keharmonisan antara ketiga UU lembaga tadi dan UU JPSK sebagai acuannya. ■